

KORAN DIGITAL

radar.
MEDIA

RADAR SAMARINDA

EDISI SABTU
11 NOV 2023

AKTUAL & TERPERCAYA

.COM



**PJ GUBERNUR-WALI KOTA BASRI SEPAKAT
KEMBALIKAN BUAYA RISKA KE HABITAT, SIAP
'MENGHUNI' DESTINASI BARU DI BONTANG**



**POLSEK PALARAN AMANKAN
BANDAR JUDI ONLINE**



PJ GUBERNUR-WALI KOTA BASRI SEPAKAT KEMBALIKAN BUAYA RISKA KE HABITAT, SIAP 'MENGHUNI' DESTINASI BARU DI BONTANG

SAMARINDA - Pemprov Kaltim ternyata masih terus memikirkan bagaimana penanganan Buaya Riska yang saat ini telah direlokasi ke Penangkaran Teritip Balikpapan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kaltim.

Pemprov Kaltim juga berkomitmen mencari solusi menjaga keselamatan Buaya Riska. Artinya, Buaya Riska harus dikembalikan ke habitatnya di alam, namun dengan pengelolaan yang lebih baik.

Penjabat (pj) Gubernur Kaltim, Dr. Akmal Malik, menegaskan bahwa Pemprov Kaltim juga sepakat dengan Pemerintah Kota Bontang agar keberadaan Buaya Riska nantinya dapat menjadi destinasi wisata baru di Provinsi Kaltim. Harapannya bahwa Buaya Riska akan menjadi daya tarik wisata di Kota Bontang dengan nama: Destinasi Wisata Buaya Riska.

"Kita harap Buaya Riska

menjadi destinasi wisata baru di Kaltim, tepatnya di Kota Bontang. Sehingga, Bontang akan memiliki destinasi wisata baru, yaitu kunjungan Destinasi Wisata Buaya Riska," kata Akmal Malik setelah bertemu dengan Wali Kota Bontang, H. Basri Rase, di Rumah Jabatan Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada Samarinda, pada Kamis, 9 November 2023.

Akmal Malik juga memberikan pesan kepada Wali Kota Bontang untuk mengelola relokasi Buaya Riska dengan baik. Hal ini memerlukan sosialisasi dan koordinasi kepada semua pihak yang belum memahami penanganan dan pengembangan Buaya Riska ke depan.

Dengan cara ini, penanganan Buaya Riska diharapkan akan menjadi salah satu kekuatan untuk pengembangan objek wisata di Provinsi Kaltim, khususnya di Kota Bontang.

"Saya sudah bicara dengan

Wali Kota Bontang, saya minta Pemkot Bontang untuk berkomunikasi dengan semua pihak. Dengan tujuan untuk menyatukan cara pandang bagaimana pengembangan wisata di Bontang," pesannya.

Sementara Wali Kota Bontang, H. Basri Rase, menjelaskan bahwa kunjungannya ke Rumah Jabatan Gubernur adalah untuk berkomunikasi terkait penanganan Buaya Riska.

Sesuai arahan dari Mendagri, penanganan Buaya Riska harus dilakukan dengan baik dan Buaya Riska harus dikembalikan ke habitatnya.

"Artinya, ditangani dengan profesional sesuai kondisi habitat Buaya Riska. Setelah upacara Hari Pahlawan, seluruh pihak di Bontang maupun BKSDA dan OPD terkait Pemprov Kaltim akan berkoordinasi untuk penanganannya. Sesuai arahan Pj Gubernur, kami siap memfasilitasi penanganan Buaya Riska," jelasnya. (adpimprov/MK)



UNGKAP KASUS NARKOBA, 2 TERSANGKA DIRINGKUS POLSEK SAMARINDA KOTA

SAMARINDA - Unit Opsnal Polsek Samarinda Kota Polresta Samarinda Polda Kaltim, Pada Rabu (8/11/23) kembali menangkap dua tersangka penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Dua pelaku tersebut berinisial A.DE (46), dan J (48).

Kapolsek Samarinda Kota Kopol Tri Satria Firdaus SIK menjelaskan, penangkapan terhadap tersangka penyalahgunaan narkotika jenis sabu itu, berkat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan KH. Agus Salim Gg. Tanjung 2, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, terdapat pelaku Penyalahgunaan Narkotika.

“Berdasar informasi dimaksud anggota langsung memastikan dan ternyata benar mendapati dua tersangka yang sedang pesta sabu di kamar tengah,” terang Kapolsek.

Lebih lanjut dijelaskan, setelah dilakukan penggeledahan badan dan tempat/rumah

orang tersebut ditemukan sisa poketan kecil 1 poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,36 gram bruto dan 1 buah alat hisap (bong) beserta pipet kaca yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di depan ke dua orang tersebut.

“Saat ini kedua tersangka beserta barang bukti sudah diamankan di Mapolsek Samarinda Kota guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut, serta akan disangkakan dengan pasal Pasal 112 Ayat (1), sub 114 Ayat (1) Jo 132 sub 127 A UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika “ ujarnya.

“Dalam keterangannya, kedua tersangka mendapatkan Narkotika tersebut dari Sdr A (DPO) dan kelanjutannya akan kami kembangkan,” pungkas Kapolsek Samarinda Kota. (rls)

Editor : Nicha Ratnasari



Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Safuad

POLSEK PALARAN AMANKAN BANDAR JUDI ONLINE

SAMARINDA - Unit Reskrim Polsek Palaran, Polresta Samarinda, Polda Kaltim berhasil mengungkap kasus perjudian togel online di jalan nahkoda RT 34 Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran. Jum'at (10/11/23)

Kapolsek Palaran, Kompol Zarma Putra,S. Sos membenarkan adanya pengungkapan kasus perjudian di wilayah yang dilakukan oleh tim opsnal Polsek Palaran.

Lebih lanjut Kapolsek menjelaskan kronologi penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat melalui hotline piket siaga Polsek Palaran di nomor 0811 5557 110 tentang adanya perjudian togel melalui WhatsApp di sekitar jalan nahkoda.

Berbekal informasi tersebut tim opsnal Polsek langsung melakukan penyelidikan di sekitar lokasi yang dimaksud.

"Dari hasil penyelidikan tersebut tim opsnal berhasil memukan identitas yang dimaksud dan langsung melakukan pengerbekan yang mana saat itu pelaku sedang menunggu pembeli di depan gang rumahnya," terang Kapolsek.

Pelaku diamankan dan dilakukan peng-

geledahan badan. Dari hasil pengeledahan diamankan 1 unit handphone merk Samsung M20 sebagai sarana transaksi dan uang sebesar Rp 52 ribu dari hasil pemesanan togel.

Kapolsek Palaran menerangkan pelaku mengakui jika dirinya sebagai bandar judi online melalui situs www.kokijaya.com.

"Saat ini pelaku beserta barang bukti uang, handphone serta bukti transaksi dan pelaku sudah kami amankan ke Mako Polsek Palaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut" ujar Kapolsek

Untuk pelaku dijerat pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun.

Kapolsek berpesan kepada seluruh warga masyarakat terutama warga Palaran untuk tidak melanggar hukum seperti perjudian.

Jika masyarakat menemukan adanya tindak pidana berupa perjudian agar segera menghubungi pihak Kepolisian baik melalui babinkamtibmasnya maupun melalui hotline piket siaga di nomor 0811 557 110. (rls)

Editor : Nicha Ratnasari

GK Grand Kartika
HOTEL

OK!
TOBER

Deluxe Room

ONLY

Rp ~~698.000,-~~ **30% OFF**

Rp 488rb

NETT/NIGHT

benefits

Breakfast
2 pax



FREE

Laundry
Up To 2 pcs



FREE

Kopi Inspirasi
Buy 3, Pay 2



FREE

**Afternoon
Tea**



FREE

Mini Mantou
5 pcs



→ BOOK NOW

0811 581 3669

www.hotelgrandkartika.com



PEMKAB PPU RAIH PREDIKAT TERBAIK KALTIM KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING 2023



BERLANGSUNG KHIDMAT, PEMKAB
PPU GELAR UPACARA PERINGATAN
HARI PAHLAWAN 2023



Pj Bupati PPU Makmur Marbun saat penyerahan bantuan keluarga stunting beberapa waktu lalu. (Robbi/MediaKaltimGroup)

PEMKAB PPU RAIH PREDIKAT TERBAIK KALTIM KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING 2023

PPU - Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) ditetapkan menjadi kabupaten terbaik se-Kaltim dalam aksi konvergensi percepatan penurunan stunting Kaltim 2023. Adapun penghargaan itu akan diterima pada saat peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-59 Kaltim dalam waktu dekat.

Penghargaan ini diberikan berdasarkan keputusan Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K/2023. Tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Aksi Konferensi Percepatan Penurunan Stunting Kaltim 2023.

"Penyerahan penghargaan penilaian dimaksud akan diserahkan pada pelaksanaan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-59 Provinsi Kaltim Tahun 2023," kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Setkab PPU Daud, Jumat (10/11/2023).

Dari data yang disampaikan, PPU berada di peringkat pertama dengan hasil penilaian 91,2. Disusul peringkat kedua diterima Kabupaten Paser dengan hasil penilaian 85,6. Selanjutnya diposisi ketiga ada Kota Balikpapan dengan hasil penilaian 86,1.

Seperti diketahui, Pemkab PPU dalam kepemimpinan Pj Bupati PPU Makmur Marbun saat ini memang sangat fokus melakukan penanganan stunting di daerah. Hal ini juga karena stunting merupakan program nasional yang wajib dilaksanakan di setiap daerah.

Dalam arahnya, upaya menekan angka

stunting tidak hanya melalui strategi memberi asupan makanan bergizi. Tetapi bahkan langkah kongkritnya sudah harus dilakukan sejak dini yakni ketika pasangan akan menikah, ibu mengandung hingga proses melahirkan.

Kemudian juga pelayanan masyarakat terkait stunting ini harus komprehensif. Salah satunya yakni melalui penyuluhan yang wajib dilaksanakan mulai tingkat kecamatan, kelurahan hingga desa di masing-masing Posyandu yang ada.

Hal inilah yang dilaksanakan Dinas Kesehatan (Diskes) PPU dengan berbagai program yang digagas. Yang memang diarahkan untuk mengurai penyebab dari persoalan stunting ini hingga ke akar-akarnya.

Semisal dengan menasar remaja putri yang salah satunya ialah pemberian tablet tambah darah. Ada juga penyuluhan kepada calon pengantin terkait edukasi reproduksi, memberi masukan terkait ketika sang ibu sedang hamil dan sebagainya.

"Bagi ibu hamil kurang gizi juga di intervensi dengan diberikan makanan tambahan. Dilanjutkan ketika kelahiran bayi dengan dilakukannya pengukuran dan penimbangan bayi dan jika ditemukan ciri-ciri stunting maka diberikan penanganannya. Jadi intervensi kami itu sejak remaja putri sampai bayi lahir hingga balita," pungkas Kepala Diskes PPU, Jansje Grace Makisurat. (ADV/SBK)



Pj Bupati PPU, Makmur Marbun saat membacakan amanat Menteri Sosial RI Tri Rismaharini, Jumat (10/11/2023). (Humas Setkab PPU for MediaKaltimGroup)

BERLANGSUNG KHIDMAT, PEMKAB PPU GELAR UPACARA PERINGATAN HARI PAHLAWAN 2023

PPU - Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) menggelar upacara Peringatan Hari Pahlawan ke-78 2023, Jumat (10/11/2023). Sebagai penghormatan terhadap jasa dan perjuangan dari para pahlawan bangsa.

Gelaran kali ini mengusung tema "Semangat Pahlawan untuk Masa Depan Bangsa dalam Memerangi Kemiskinan dan Kebodohan. dilaksanakan di Halaman Kantor Bupati PPU, dipimpin oleh Komandan Upacara, Lettu Inf Janito dan Pj Bupati PPU Makmur Marbun bertindak sebagai Inspektur Upacara.

Dalam amanat Menteri Sosial RI Tri Rismaharini yang dibacakan Makmur, mengungkapkan peringatan tiap tahun ini merupakan sebuah renungan mendalam, untuk menjawab ancaman penjajahan modern yang kian nyata. Mengingat Indonesia merupakan pasar yang besar dan dikaruniai begitu banyak sumber daya alam yang luar seperti tanah yang subur, hasil laut yang melimpah, dan kandungan bumi yang menyimpan beragam mineral.

"Inilah tantangan yang sesungguhnya bagi generasi penerus untuk men-

gelola kekayaan alam dan juga potensi penduduk Indonesia bagi kejayaan Bangsa dan Negara," ucapnya.

Pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Serta mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara diatas kepentingan kelompok dan atau diri sendiri.

"Kita bukan bangsa yang pecundang. Kita tidak akan pernah rela untuk bersimpuh dan menyerah kalah, sebesar apapun ancaman dan tantangan akan kita hadapi," tegas Makmur.

Ia menuturkan bahwa semangat yang berasal dari nilai perjuangan pahlawan itu hendaknya mampu membawa dan menyatukan masyarakat hari ini. Dalam mewujudkan kehidupan kebangsaan yang ber-satu, berdaulat, adil dan makmur.

Serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa mewujudkan masa depan yang lebih baik. "Mari kita bangun usaha dan ekonomi kerakyatan yang akan menjadikan Indonesia tumbuh menjadi negara yang makin maju, makin sejahtera," pungkas Makmur. (ADV/SBK)



Audiensi bersama KKP RI digelar di Ruang Rapat Bupati PPU, Jumat (10/11/2023). (Robbi/MediaKaltimGroup)

PEMKAB PPU SIAP TINDAKLANJUTI HASIL ASSESSMENT KKP RI PERSIAPAN KAMPUNG NELAYAN MODERN

PPU - Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun kembali menerima audiensi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Jumat (10/11/23). Kali ini berkaitan dengan assessment dan identifikasi penyusunan model rekayasa sosial calon lokasi Kampung Nelayan Modern.

Diketahui, terdapat 3 daerah yang dilakukan assesmen dan identifikasi di PPU yang dilakukan oleh Tim KKP sejak Senin 6 November lalu. Yaitu Kelurahan Sesumpu, Kelurahan Waru dan Kelurahan Tanjung Tengah.

"Saya sudah mengikuti day to day terkait apa yang telah dilakukan oleh teman-teman dari KKP. Mereka sudah melihat situasi seperti apa, dan bagaimana Kita akan menata ini," ujarnya.

Kegiatan assesmen dan identifikasi ini bertujuan untuk penilaian kesesuaian calon Kampung Nelayan Maju (Kalaju) 2024. Dalam hal ini, ada berbagai poin yang dikaji sebagai langkah dalam memajukan sektor perikanan, untuk pemenuhan kebutuhan pangan.

Mulai dari penggalan informasi jumlah nelayan, kepala keluarga dan jumlah penduduk, penilaian potensi sumber daya perikanan dan

ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya perikanan. Lalu informasi umum usaha perikanan, penilaian sarana dan prasarana yang belum berkembang, karakteristik sosial ekonomi dan penilaian keberterimaan masyarakat.

Kemudian ketersediaan lahan untuk dikembangkan yang nantinya akan menghasilkan rekomendasi lokasi kampung nelayan modern 2024. "Saya tidak bisa bayangkan bagaimana nanti tahun 2024 ada sebanyak 18.000 ASN yang masuk ke IKN. Darimana mereka makan akan makan ikan. Pemasoknya kan dari PPU, berapa ton yang harus disiapkan. Makanya Kita harus punya cold storage-nya seperti apa, BBM nya bagaimana, dan sebagainya," ungkapnya.

Lebih lanjut, Makmur berkomitmen untuk memajukan kemandirian daerah dalam menjadi penyangga pangan Ibu Kota Nusantara (IKN). Maka dari itu, hasil dari assessment ini dipastikan akan segera ditindaklanjuti.

"Apa yang harus disampaikan, akan Saya siapkan. Sepanjang itu sesuai dengan regulasi yang ada, Saya siap 100 persen," pungkasnya. (ADV/SBK)



Pj Bupati PPU, Makmur Marbun saat menyerahkan penghargaan pada tenaga kerja konstruksi PPU berprestasi dalam kompetisi konstruksi pada acara Konstruksi Indonesia (KI) 2023, Kamis (9/11/2023). (Robbi/MediaKaltimGroup)

PEMKAB PPU GELAR FORUM JASA KONSTRUKSI, TINGKATKAN JUMLAH TENAGA KERJA BERSERTIFIKAT

PPU - Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) menyelenggarakan Forum Jasa Konstruksi di Aula Hotel Aqila, Kamis (9/11/2023). Kegiatan ini bertujuan membahas isu-isu terkini industri konstruksi di PPU yang melibatkan masyarakat jasa konstruksi, yaitu pengguna jasa, penyedia jasa, dan unsur lainnya.

Tema dalam kegiatan kali ini ialah "Kesiapan Tenaga Kerja Konstruksi Kabupaten Penajam Paser Utara dalam Mewujudkan Penajam Paser Utara Serambi Nusantara". Pj Bupati PPU Makmur Marbun saat membuka kegiatan menyampaikan sertifikasi menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan.

Sertifikasi tenaga kerja konstruksi ini menjadi penting guna menjamin kualitas konstruksi yang dibangun. Pun Forum Jasa Konstruksi, sebut Makmur, seharusnya sudah harus diterapkan bertahun-tahun lalu, minimal setahun sekali.

"Melalui forum ini, kita memiliki kesempatan untuk mendengar ide, pengalaman, dan perspektif dari berbagai pihak terkait di sektor konstruksi ini. Semoga ke depan Kita bisa terus bergandengan tangan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan sektor jasa konstruksi di PPU," ungkapnya.

Forum ini, sambungnya, dapat menjadi wadah bagi masyarakat jasa konstruksi untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah atau lembaga. Maka itu, pihaknya berkomitmen mendukung segala sesuatu yang diperlukan agar sektor konstruksi semakin optimal.

"Kami akan terus mendorong investasi di bidang ini, dengan menyediakan akses informasi yang lebih baik. Serta memberikan

dukungan dan fasilitas yang dibutuhkan bagi seluruh pelaku industri dalam mewujudkan proyek-proyek konstruksi yang berkualitas dan berdampak positif bagi perkembangan PPU," jelas Makmur.

Dalam Forum Jasa Konstruksi ini, diberikan pula penghargaan kepada Tenaga Kerja Konstruksi PPU peserta kompetisi konstruksi pada acara Konstruksi Indonesia (KI) 2023. Waras Wahyudi Juara 3 Nasional kategori Jabatan Kerja Tukang Bata, Imam Hanafi kategori Jabatan Kerja Tukang Pasang Rangka Baja Ringan, dan Naafi'u Hayyu Nikmah kategori BIM Modelling.

Sementara, Kepala Dinas PUPR PPU Riviana Noor menuturkan akan ada penambahan Bidang Bina Konstruksi di Dinas PUPR. Sehingga dapat lebih fokus dan mempercepat kinerja penyelesaian permasalahan.

"Untuk itu, dibutuhkan dukungan dan kebijakan di dalam kegiatan percepatan sertifikasi bagi tenaga kerja konstruksi di PPU" katanya.

Alasannya, kini di PPU terdapat 77,5 persen tenaga kerja konstruksi yang belum tersertifikasi atau sejumlah 4.324 orang. Maka itu, langkah awal mengatasi persoalan itu ialah dengan meminta dukungan bantuan keuangan dari provinsi untuk sertifikasi tenaga terampil di PPU.

"Mari bersama-sama mencari solusi terbaik untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan keberlanjutan dalam proyek-proyek konstruksi yang sedang dilakukan dan akan datang. Sehingga kedepannya juga bagi yang belum memiliki sertifikat bisa memilikinya," tutup Riviana. (ADV/SBK)



Pj Bupati PPU Makmur Marbun saat berdialog bersama para petani di Babulu, Jumat (10/11/2023). (Humas Setkab PPU for MediaKaltimGroup)

DORONG PERCEPATAN PEMBANGUNAN SEKTOR PERTANIAN, MAKMUR DIALOG BERSAMA BULOG DAN KELOMPOK TANI BABULU

Pj - Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun menghadiri kegiatan Dialog Bersama Bulog dan Kelompok Tani, Jumat (10/11/2023). Diharapkan dalam Dialog ini akan berkontribusi besar dalam memajukan sektor pertanian, guna menunjang terwujudnya kedaulatan pangan di wilayah lumbung padi PPU.

Acara ini digelar di Ruang Pertemuan Balai Penyuluh Pertanian, Desa Gunung Mulia, Kecamatan Babulu. Makmur menuturkan kegiatan seperti ini ialah jalan untuk saling menyamakan persepsi, antara pemangku kebijakan dan pelaku di lapangan.

"Pemerintah Daerah Kabupaten PPU terus berupaya keras untuk mendorong percepatan pembangunan sektor pertanian," ucapnya.

Selain itu, juga dengan pengembangan kelembagaan yang ada seperti kelompok tani maupun gabungan kelompok tani. Makmur berharap dengan semakin berkembangnya lembaga pertanian.

"Petani akan lebih termotivasi dalam memanfaatkan lahan yang ada seoptimal mungkin," sebutnya.

Sekadar informasi, PPU setidaknya memiliki lahan sawah pertanian fungsional yang luasnya mencapai 9.020,26 hektare, dari luasan total lahan basah 12.445 hektar. Dengan produktivitas panen baru mencapai 3,33 ton per hektare.

Jumlah itu, berpotensi untuk ditingkatkan menjadi 4.5 hingga 5 ton perhektare ketika musim panen. "Jadi tidak heran apabila Kabupaten PPU, terutama Kecamatan Babulu dijadikan sentra lumbung padi di Kalimantan Timur," ucapnya.

Dalam kesempatan ini, Makmur mengimbau pada para petani agar dapat lebih kreatif untuk memilih komoditas tanaman. Utamanya yang sekiranya paling menguntungkan saat musim kemarau tiba.

Mengingat besarnya potensi itu, sejalan dengan peluang besar hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN), para petani di PPU harus mampu untuk meningkatkan hasil produksi dan kualitasnya. "Karena tidak menutup kemungkinan juga, menjadi penyuplai untuk masyarakat Ibu Kota Nusantara nantinya," tutupnya. (ADV/SBK)



Pj Bupati PPU Makmur Marbun secara daring dan dihadiri oleh para pelaku usaha di Kabupaten PPU, Jumat (10/11/2023). (Diskominfo PPU for MediaKaltimGroup)

PEMKAB PPU GELAR BIMTEK IMPLEMENTASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO, KEJAR TARGET REALISASI INVESTASI 2023

PPU - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Penajam Paser Utara (PPU) melaksanakan bimbingan teknis (bimtek) Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko pada para pelaku usaha, Kamis (10/11/2023). Giat ini dibuka oleh Pj Bupati PPU Makmur Marbun secara daring dan dihadiri oleh para pelaku usaha di Kabupaten PPU, Jumat (10/11/2023).

Kegiatan ini akan berlangsung selama dua hari, mulai 10 sampai 11 November 2023. Makmur mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk upaya pemerintah daerah terhadap pelaku usaha.

Khususnya terkait pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko. Juga sebagai bentuk komunikasi dua arah antara pemerintah daerah dan pelaku usaha.

"Perlu kita ketahui bahwa, target realisasi investasi Kabupaten PPU tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp 2,6 triliun," ucapnya.

Target itu, baik yang berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sesuai target dari Provinsi Kaltim. Sedangkan realisasi investasi PPU pada 2022 hanya mencapai Rp 1,4 triliun atau mencapai 52,114 persen dari target realisasi investasi tahun 2022.

Makmur mengungkapkan untuk target realisasi investasi pada 2023 ini, ditetapkan sebesar Rp 2,1 triliun baik dari PMA dan PMDN. Sementara, realisasinya hingga triwulan ke-3 2023 ini baru mencapai sebesar Rp 906 miliar atau mencapai 43,15 persen dari target realisasi.

"Untuk itu, melalui kegiatan bimtek hari ini, diharapkan pelaku usaha dapat lebih memahami proses pengajuan izin usahanya dan kewajibannya setelah izin terbit," tegas Makmur.

Selain itu juga, fasilitator yang ada di DPMPTSP

PPU diintruksikan untuk membantu para pelaku usaha secara optimal. Khususnya yang ingin mengurus izinnya dan mendapatkan izin usaha melalui Online Single Submission (OSS).

Lebih lanjut, Makmur berharap kepada pelaku usaha yang hadir dapat mulai membuka pola pikir. Bahwa dunia telah berubah dan kita dituntut untuk menyesuaikan perubahan yang sudah berkembang dengan berbagai kemajuan digitalisasi.

"Bagaimana mengurus izin hanya dengan menggunakan smartphone hingga izin tersebut terbit. Sehingga DPMPTSP Kabupaten PPU dapat mengedukasi ke pelaku usaha yang hadir hari ini dan diharapkan setiap pelaku usaha, baik yang di kecamatan, kelurahan dan desa-desa agar memiliki izin usaha," tuturnya.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP PPU Hadi Saputro menambahkan melalui adanya bimtek ini ialah upaya untuk memahamkan kembali para pelaku usaha. Agar lebih memberikan perhatiannya kepada apa yang menjadi kewajiban dan tanggungjawabnya.

Melalui bimtek ini pula, pihaknya mencoba untuk memberikan pemahaman agar pelaku usaha. Bahwa, selain mendaftarkan usaha juga melaporkan perkembangan usaha yang dijalankan.

Baik sistem pelaporan skala usahanya, perkembangan usahanya. Termasuk bagaimana mereka melakukan corporate social responsibility (CSR), bagi usaha yang memiliki investasi diatas Rp 5 miliar.

"Harapannya kepada para pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha agar dapat mendaftarkan jenis usahanya agar kami selaku DPMPTSP lebih memudahkan kami melakukan pembinaan secara berjenjang," pungkas Hadi. (ADV/SBK)

KORAN **DIGITAL**

radar.
MEDIA

RADAR KUKAR

EDISI SABTU
11 NOV 2023

AKTUAL & TERPERCAYA

.COM



**JARINGAN LISTRIK 24 JAM AKAN
SEGERA HADIR DI DESA MELINTANG**

PERINGATI HARI PAHLAWAN, EDI DAMANSYAH MINTA GENERASI MUDA WARISI SEMANGAT PERJUANGAN

TENGGARONG- Peringatan Hari Pahlawan ke-78 di Kutai Kartanegara (Kukar), digelar di Kecamatan Muara Kaman. Pemilihan Kecamatan Muara Kaman sebagai lokasi upacara, tidak terlepas dari sejarah perlawanan terhadap penjajah dimasa lalu. Bahkan salah satu pahlawan nasional, Muso bin Salim, adalah putra asli Kecamatan Muara Kaman.

Peringatan Hari Pahlawan pun diperingati dengan gelaran upacara, disusul dengan ziarah kubur dan tabur bunga ke makam pahlawan kebanggaan tanah Kutai tersebut. Bupati Kukar, Edi Damansyah, yang memimpin langsung upacara juga turut mengapresiasi seluruh unsur yang terlibat dalam kegiatan ini.

"Upacara Hari Pahlawan ini sebagai bentuk penghargaan untuk mengenang jasa pejuang, khususnya yang berasal dari Kecamatan Muara Kaman. Pejuang asli Tanah Kutai, Muso bin Salim," kata Edi Damansyah, Jumat (10/11/2023).

Peringatan Hari Pahlawan ke-78 ini, mengusung tema "Semangat Pahlawan untuk Masa Depan Bangsa dalam Memerangi Kemiskinan dan Kebodohan". Edi mengatakan, tema ini menjadi tantangan sesungguhnya bagi generasi penerus bangsa. Sebagai anak bangsa, kita dituntut untuk dapat mengelola kekayaan alam dan potensi penduduk yang dimiliki bangsa ini. Untuk mempersembahkan kejayaan yang sejak lama menjadi angan-angan para pahlawan yang telah gugur dimedan perang.

Menurutnya, pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok atau pribadi. Pahlawan telah menga-



Suasana Upacara Peringatan Hari Pahlawan ke-78 di Kecamatan Muara Kaman. (Istimewa)

jarkan kepada generasi penerus bangsa, jika Bangsa Indonesia tidak akan pernah rela untuk bersimpuh dan menyerah kalah pada keadaan.

"Sebesar apapun ancaman dan tantangan akan kita hadapi. Dengan tangan mengepal dan dada menggelora," terang Edi Damansyah.

Mengingat sejarah ke belakang, dengan hanya berbekal bambu runcing, para pahlawan dalam pertempuran 10 November bahkan berhasil menghadapi musuh yang merupakan pemenang perang dunia dengan persenjataan terbaiknya. Keberanian dan keyakinan, merupakan kunci utama perjuangan membela tanah air.

Para pahlawan bangsa ini telah membuktikan, bahwa bangsa ini adalah bangsa yang besar dan kuat. Dengan persatuan, sebesar apapun rintanga yang harus dihadapi bukanlah persoalan. Tidak ada alasan untuk menyerah dan tunduk, selagi kita terus bersatu dan mau berjuang, hal yang terlihat tidak masuk akal sekalipun bisa kita menangkan "Merdeka atau Mati!," seru Edi dalam pidatonya.

Tak lupa, Edi Damansyah menitip pesan kepada seluruh penerus bangsa ini. Untuk turut berjuang dalam memberantas kebodohan dan memerangi kemiskinan agar definisi kemerdekaan yang sesungguhnya dapat dilihat dan dirasakan denyutnya di seluruh pelosok Negeri.

Sebagai generasi penerus, seluruh anak bangsa diminta untuk mewarisi semangat yang berasal dari nilai perjuangan Pahlawan Bangsa di tahun 1945. Semangat yang membawa Bangsa Indonesia menolak kalah dan menyerah pada keadaan. Menyatukan seluruh lapisan masyarakat dalam upaya mewujudkan kehidupan kebangsaan yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa untuk masa depan yang lebih baik.

"Bersama kita bangun usaha dan ekonomi kerakyatan yang akan menjadikan Indonesia tumbuh menjadi negara yang makin maju, makin sejahtera," pungkasnya.

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi'i



TANGANI TBC, RSUD BONTANG AUDIT KLINIS TBC RO BERSAMA DINKES

BACA HALAMAN A2



**DOKTER SPESIALIS KEJIWAAN
RSUD BONTANG: JANGAN TAKUT
BEROBAT KE KLINIK PSIKIATRI!**



Pegawai, dokter RSUD, dan fasilitator saat melaksanakan audit klinis TBC RO. (Yahya Yabo)

Tangani TBC, RSUD Bontang Audit Klinis TBC RO Bersama Dinkes

BONTANG – RSUD Taman Husada Bontang melaksanakan audit klinis pengawasan TBC RO bersama Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim pada Kamis (9/11/2023). Kegiatan ini dengan melakukan pertemuan meeting zoom di lantai 4 gedung baru RSUD Bontang.

Direktur RSUD Taman Husada Bontang, dr Suhardi, Sp.JP mengungkapkan, kegiatan audit klinis TB RO atau TBC RO sebagai program pusat Kemenkes untuk melakukan pengawasan terkait tata laksana penanganan penyakit TBC yang merupakan program pemerintah.

Ia juga mengatakan harus melibatkan berbagai lintas sektor seperti di rumah sakit, Puskesmas untuk pengobatan dan perlu sisi lainnya untuk edukasi dan rehabilitasi.

"TBC ini diminimalkan atau bahkan dihilangkan. Masalah TBC ini perlu multisektor untuk penanganannya. Hari ini audit klinis yang dimaksudkan dari Kemenkes berharap agar tatalaksana atau pengobatan bisa berjalan sesuai SOPnya. Juga merupakan momen untuk konsultasi bagi rumah sakit di daerah agar memberikan masukan," kata dr Suhardi, Kamis (9/11/2023).

Selanjutnya, dr Suhardi mengatakan RSUD Bontang merupakan rumah sakit rujukan bagi pasien TBC yang memerlukan pengobatan lebih lanjut.

"Karena RSUD Bontang terkait pengobatan TBC tetap menjadi rujukan. Terutama bagi pasien TBC dengan Resisten Obat, pasien TBC dengan komplikasi dengan penyakit lainnya yang harus di-

rujuk ke RSUD," jelasnya.

Ia mengatakan, setelah kegiatan audit klinis ini, pegawai RSUD Bontang yang menangani dan pemberi pelayanan penyakit TBC dapat mendapatkan tambahan ilmu terkait tata laksana penanganan TBC.

"Harapannya teman-teman sebagai pemberi layanan dapat menambah ilmu. Adanya penyempurnaan terkait kegiatan yang sudah dilaksanakan. Kegiatan TBC ini kan' sudah dilaksanakan mengenai pelaporannya, pelayanannya. Itu semua telah dilaporkan," pungkasnya.

Audit klinis TBC RO di RSUD Bontang ini dihadiri oleh fasilitator dinas kesehatan Provinsi Kaltim, dr Parluhutan Dolly Siregar, Sp.P dan Guruh Wicaksono. (adv/yah)



dr Dewi Maharni, M.Sc, Sp.KJ, Dokter Spesialis Kejiwaan RSUD Taman Husada Bontang. (Yahya Yabo)

Dokter Spesialis Kejiwaan RSUD Bontang: Jangan Takut Berobat ke Klinik Psikiatri!

BONTANG – RSUD Taman Husada Bontang memiliki klinik Psikiatri atau kejiwaan, untuk melayani pasien dengan keluhan kesehatan kejiwaan atau mental.

Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa RSUD Taman Husada Bontang, dr Dewi Maharni, M.Sc, Sp.KJ menjelaskan, klinik psikiatri merupakan klinik untuk melayani konsultasi dan pengobatan dalam permasalahan kesehatan mental atau kesehatan jiwa. Dalam proses alur pelayanannya, dr Dewi mengatakan, sama seperti klinik lainnya dalam proses pendaftaran, ke poli klinik hingga pengambilan obat.

"Klinik psikiatri sendiri melayani semua gangguan mental baik gangguan ringan, sedang, hingga gangguan jiwa berat," kata dr Dewi Maharni, Kamis (9/11/2023).

Selanjutnya, dr Dewi mengatakan, pada umumnya pasien yang datang yakni pasien umum, pasien asuransi, maupun pasien BPJS Kesehatan yang memerlukan bantuan konsultasi dan pengobatan masalah mental atau kejiwaan.

"Masih banyak stigma di luar sana yang menganggap apabila berobat ke dokter jiwa dianggap 'gila'. Banyak sih yang mengalami gangguan jiwa ringan seperti gangguan tidur dan kecemasan, yang masih menolak untuk diperiksa," ungkapnya.

Selain itu, beberapa gangguan jiwa ringan, sedang dan berat memiliki beberapa gejala dan permasalahan masing-masing yang dapat mengganggu aktifitas kehidupan sehari-hari.

"Gejalanya ada berbagai macam dalam mengganggu kehidupan sehari-hari yang juga bisa berdampak pada kondisi kesehatan fisik. Pada gangguan jiwa berat seseorang bahkan sampai tidak bisa membedakan antara kenyataan dan imajinasinya. Bahkan juga mengalami halusinasi dan ilusi. Sehingga fungsi peran seseorang dalam kehidupan sehari-harinya menurun atau tidak berfungsi seperti sebelum mengalami gangguan," jelasnya.

Pasien yang datang berobat di klinik psikiatri ada yang diterapi dengan obat-obatan dan ada juga dilakukan psikoterapi. Pasien yang datang pun berasal dari pasien umum, pasien asuransi dan BPJS Kesehatan yang bisa melayani 15 sampai 20 pasien setiap hari.

"Psikoterapi juga dilakukan pada pasien-pasien gangguan jiwa," ungkapnya.

Klinik psikiatri diharapkan dapat menjadi pelayanan kejiwaan yang baik, dengan memberikan pelayanan kepada semua lapisan masyarakat.

"Harapannya masyarakat jangan lagi terstigma sehingga takut dan malu untuk berobat di klinik psikiatri atau kejiwaan," terangnya. (adv/yah)



dr Suhardi, Sp.JP, Direktur RSUD Taman Husada Bontang. (Yahya Yabo)

Ada Penilaian Kebugaran untuk Karyawan di HUT RSUD Bontang ke-21

BONTANG – Direktur RSUD Taman Husada Bontang, dr Suhardi, Sp.JP mengatakan, pelaksanaan HUT ke-21 RSUD Taman Husada akan dilaksanakan dan berpusat di RSUD Bontang.

Nantinya akan ada launching sistem kebugaran (sipgar), untuk memberikan penilaian mengenai kebugaran karyawan atau staf RSUD Bontang.

Ia menjelaskan, bahwa kegiatan HUT ke-21 RSUD Bontang akan dilaksanakan pada 12 November 2023 mendatang.

"Kegiatannya akan ada senam bersama. Ada launching Sipgar atau upaya agar kita lebih bugar

sebagai tenaga kesehatan. Sipgar itu semacam penilaian kebugaran untuk karyawan," jelasnya.

Selanjutnya, Ia mengatakan HUT ke-21 merupakan momen memberikan kemeriahan kepada karyawan dan staf RSUD Bontang.

"Momen HUT RSUD sebagai wadah dalam memberikan kemeriahan juga sebagai tempat menjalin komunikasi agar kembali akrab, solid, dan menjalin kebersamaan. Untuk penilaian kebugaran akan diterapkan pada karyawan RSUD Bontang, saat HUT nanti sifatnya masih launching," terangnya. (adv/yah)



Kepala Dinas DPMPSTP, Asdar Ibrahim. (Syakurah/Radarbontang)

Lahan Industri Bontang Dikelola PT KIB

BONTANG - Kota Bontang memiliki lahan yang diperuntukkan untuk kebutuhan investor di bidang industri sebanyak 1.100 hektar.

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP), Asdar Ibrahim menjelaskan, terdapat mitra pemerintah Kota Bontang, yakni PT. Kawasan Industri Bontang (KIB).

PT. KIB sudah mengantongi kurang lebih 600 hektar yang memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dari Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan 200 hektarnya milik perusahaan itu sendiri.

"Kalau ada investor di titik RT yang 1.100 tadi itu, mereka harus ketemu PT. KIB itu, apakah dia beli lahan atau sewa lahan," jelasnya.

Ia menjelaskan, bahwa perusahaan tersebut menjadikan dirinya sebagai mitra dari pemerintah Kota Bontang untuk mencari investor. Hal ini merupakan salah satu cara untuk menjemput investor-investor luar.

"Kami promosinya jalan juga, mereka juga jalan, jadi saling mencari," tambahnya.

Asdar mengharapkan, dalam waktu dekat akan ada pembangunan perusahaan baru yang dirasa sangat berpotensi untuk kemajuan Kota Bontang, seperti pelabuhan peti kemas, pabrik soda, pabrik kaca, dan masih banyak lagi.

"Seperti pabrik soda ash itu kan, saya berharap bisa berkembang setelah itu menarik investor lain," tutupnya. (sya/adv)



Kondisi pelayanan di Gedung MPP.

Pelayanan Pengurusan Izin DPMPPTSP di Gedung MPP Diminati Warga Bontang Selatan

BONTANG - Pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DP-MPTSP) di Mall Pelayanan Publik (MPP) Pasar Taman Rawa Indah (Tamrin) diminati masyarakat Bontang. Terhitung masih banyak warga Bontang yang mengurus surat perizinan untuk usaha, di lantai paling atas Gedung Pasar Tamrin tersebut.

Tahun ini tercatat sekira 1.700 warga Bontang yang mengurus surat untuk perizinan di DP-MPTSP. Sementara di MPP, yang mendominasi adalah warga Bontang Selatan. Sedangkan di

kantor pusat, mendominasi wilayah Bontang Utara dan Bontang Barat.

Hal itu diungkapkan Asdar Ibrahim, Kepala Dinas DPMPPTSP Bontang. Dikatakannya, untuk kantor pusat maupun pelayanan di MPP, sejauh ini sama-sama berjalan seperti biasanya, lancar dan tanpa ada kendala apapun.

"Kantor pusat maupun di MPP sama saja, akan tetapi kalau di kantor pusat kami ada pelayanan sampai malam, dimana hanya seminggu dua kali," ucapnya saat diwawancarai, Rabu (8/11/2023) kemarin. (dwi/adv).



Adrofdita, Anggota Komisi I DPRD Bontang. (Dwi)

Komisi I DPRD Bontang dan DPK Laksanakan Konsultasi Publik Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan

BONTANG - Komisi I DPRD Bontang bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kota Bontang melaksanakan rapat terkait Konsultasi Publik tentang Raperda Penyelenggara Perpustakaan, Selasa (7/11/2023).

Adrofdita, Anggota Komisi I DPRD Bontang menyatakan, adanya raperda penyelenggaraan perpustakaan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta kualitas pelayanan terkhususnya di perpustakaan.

Maka dari itu, konsultasi publik ini digelar bertujuan sebagai salah satu bentuk tindak lanjut dari pembahasan sebelumnya antara DPRD Bontang dan DPK.

"Kita menjalankan sesuai dengan pemerintah daerah, dengan kondisi kemampuan yang ada. Bahkan untuk SDM pun, kita bisa menggunakan pemuda daerah," ucapnya.

Kota Bontang sendiri memiliki beberapa perusahaan yang ada, dalam hal itu Adrof menyarankan agar dari beberapa perusahaan yang ada di Bontang bisa turut serta membantu perpustakaan bahkan sekolah yang sudah memiliki relokasi untuk tingkat standar.

"Kota kita dikelilingi beberapa perusahaan, bisa

jadi mereka membantu dan ikut serta dalam beberapa hal. Berharapnya seperti itu," paparnya.

Kalaupun di Kota Bontang ada penulis yang mempunyai sebuah karya, serta bisa menarik daya para pembaca itu sangat dibutuhkan oleh perpustakaan. Atau bahkan untuk bedah buku pun menjadi salah satu cara membangun literasi anak-anak minat baca.

"Kita nanti pastinya akan memberikan suatu penghargaan, jika ada yang mempunyai sebuah karya bagus. Membangun minat baca, apalagi terkhusus anak sekolah," ungkapnya.

Adrof juga menambahkan dengan adanya kegiatan konsultasi publik ini, dengan banyaknya yang datang dapat memberikan masukan-masukan dari beberapa pihak. Terkait untuk membenahi yang dulunya belum sempat terlaksana.

"Saya tidak menyangka, antusias mereka sangat tinggi dan bagus. Sehingga ada banyak sekali yang datang dan memberikan masukan untuk kita serap," tutupnya.

Konsultasi publik ini bertujuan untuk meminta masukan dari beberapa pihak di antaranya dari sekolah, kampus, kelurahan, serta yayasan. Saran dan masukan itu nantinya dapat menyempurnakan raperda. (dwi).



UMKM RAUP CUAN LEBIH DI PAGELARAN BERAU EXPO 2023

AD



**MINTA PEMERINTAH
DONGKRAK PAD**



Suasana pagelaran Berau EXPO 2023.

UMKM RAUP CUAN LEBIH DI PAGELARAN BERAU EXPO 2023

TANJUNG REDEB - Sebanyak 79 stan menampilkan berbagai produk unggulan dalam Berau EXPO 2023 di Lapangan Gor Pemuda. Diketahui, pagelaran tersebut telah mulai sejak 1 November lalu hingga 10 November 2023.

Eksekutif Produser CV Vocus Production atau EO Berau EXPO 2023, Morten mengungkapkan, dalam acara puncak rangkaian hari jadi Kabupaten dan Kota Tanjung Redeb itu diikuti oleh pelaku UMKM, dunia usaha serta instansi pemerintahan.

"Dengan adanya Expo tahun ini, diharapkan mampu mendorong dunia usaha, terutama UMKM supaya bisa naik kelas dan memiliki daya saing," ungkapnya.

Dia memaparkan, dari 79 stan yang ada diantaranya 61 stan diisi beberapa OPD dan 18 stan terisi umum.

"Untuk OPD itu baik daerah maupun vertikal. Sedangkan, stan umum, maksudnya terdiri dari binaan Diskoperindag dan perusahaan swasta, BUMN, BUMD serta dunia pendidikan dan lain-lain," paparnya.

Menurut Morten, sesuai dengan tema yang diusung, adanya Berau Expo 2023 ini diharap-

kan meningkatkan perekonomian masyarakat. Pasalnya, terjadi perputaran ekonomi yang cukup tinggi.

"Expo ini selain sebagai ajang informasi dan promosi, juga sebagai ajang silaturahmi sekaligus untuk meningkatkan kualitas dan memasarkan jenis dari produk unggulan yang ditampilkan masing-masing peserta," jelasnya.

Sementara, salah seorang pelaku UMKM yang menjual produk kuliner di Berau Expo 2023, Ratnawati mengaku sangat beruntung karena dapat ambil bagian menjajakan dagangannya. Sebab, omset per hari menyentuh angka Rp1 juta.

"Yang tinggi itu pada saat malam minggu (4/11/2023) lalu. Pengunjung banyak banget, dagangan saya juga sampai habis, omsetnya hampir Rp 2 juta," bebarnya.

Kendati demikian, dirinya berharap Berau Expo dapat dapat diadakan pada tahun depan. Sebab, dinilainya berdampak positif terhadap pelaku UMKM atau pedagang.

"Berau Expo ini dapat meningkatkan penjualan produk UMKM, membuka peluang bisnis baru, dan membantu para pelaku UMKM," pungkasnya. (dez)



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU



Anggota Komisi II DPRD Berau, Rahman mengapresiasi pagelaran Berau Expo 2023.

APRESIASI PAGELARAN BERAU EXPO

TANJUNG REDEB – Anggota Komisi II DPRD Berau, Rahman mengapresiasi pagelaran Berau Expo tahun 2023. Pasalnya acara pameran dagang itu berlangsung meriah.

Dia menilai, Berau Expo juga memeriahkan Hari Jadi ke-70 tahun Kabupaten Berau dan ke-213 tahun Kota Tanjung Redeb.

“Pastinya menambah keseruan dan kemeriahan perayaan HUT Berau tahun ini,” katanya.

Apalagi, selama 2 tahun Pemkab Berau tidak bisa mengadakan Berau Expo, lantaran masih dilanda Pandemi Covid-19. Tentunya pagelaran expo tahun ini sangat

dinantikan oleh masyarakat Berau.

Diharapkannya, Berau Expo bisa memberikan semangat pembangunan untuk Berau yang lebih inovatif dan lebih baik lagi.

“Semoga ekonomi bangkit, Berau kuat dan masyarakat sejahtera,” harapnya.

Diketahui, Pemkab Berau mengalokasikan dana sebesar Rp 3 miliar untuk sukseskan Berau Expo tahun 2023. Acara yang berlangsung selama 10 hari tersebut secara gratis bisa diakses oleh seluruh masyarakat, tanpa dipungut biaya masuk. (adv/dez)



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU



Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiyah.

MINTA PEMERINTAH DONGKRAK PAD

TANJUNG REDEB - Pada tahun 2023 ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berau baru menyentuh angka 5,5 persen dari target 10 persen.

Merespons hal tersebut, Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiyah mendorong pemerintah untuk mendongkrak PAD.

"Padahal PAD Berau dipungut dari berbagai sektor. Tapi justru APBD banyak ditopang dari sektor yang tidak bisa diperbaharukan," ungkapnya.

Ia meminta Pemkab Berau untuk berbenah diri dan memastikan agar tahun depan, semua sektor dapat berkontribusi pada PAD hingga 10 persen. Apalagi APBD Berau 2024 sudah mencapai Rp 4,7 triliun.

"Karena itu perlu inovasi-inovasi besar untuk meningkatkan PAD dari sektor-sektor yang berpotensi besar seperti dari pajak galian C, sarang burung walet dan masih

banyak lain. Cuma kan belum terorganisir dengan baik jadi belum bisa maksimal," jelasnya.

Diakuinya, sejauh ini pihak legislatif sudah mendorong pemerintah daerah agar dapat meningkatkan PAD itu hingga mencapai 10 persen. Namun, pemerintah daerah dalam hal ini OPD-OPD terkait belum menyanggupi hal tersebut.

Ke depan, pemerintah daerah perlu berinovasi dan memaksimalkan kinerjanya dalam menata semua sektor. Termasuk mengevaluasi kembali segala hal yang selama ini menjadi kendala dalam sumbangsinya terhadap PAD Berau tersebut.

"Harapan kami APBD yang sudah meningkat signifikan ini harus meningkat pula PAD kita. Makanya OPD perlu berinovasi dan mulai berangsur-berangsur memaksimalkan kinerjanya," tutupnya. (adv/dez)



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU**



Anggota Komisi I DPRD Berau, Faletinus Keo Meo.

MINTA PEMERINTAH SERIUS TANGANI LAHAN PASCA TAMBANG

TANJUNG REDEB - Anggota Komisi I DPRD Berau, Faletinus Keo Meo meminta pemerintah serius menangani lahan pasca tambang untuk mengembangkan sektor berkelanjutan.

Dia menyebut, sektor berkelanjutan seperti pertanian pangan serta hortikultura, merupakan beberapa sektor pilihan yang berpotensi sebagai pengganti sektor pertambangan.

"Yang harus diperhatikan adalah bagaimana jaminan reklamasi perusahaan terhadap lahan pasca tambang. Harus memperhitungkan keberadaan sektor, selain pertambangan," ujarnya.

Menurutnya, Pemkab Berau harus terus mengingatkan perusahaan pertambangan terkait reklamasi tersebut. Pasalnya, saat ini banyak lahan perta-

nian yang telah beralih fungsi menjadi lahan pertambangan.

"Padahal, jika sektor pertambangan anjlok, sektor pertanian adalah yang paling memungkinkan untuk dikembangkan. Maka dari itu dipikirkan dari sekarang," katanya.

Politikus Demokrat ini berharap, sektor pertanian mendapat perhatian khusus oleh Pemkab Berau, termasuk kucuran anggaran yang disiapkan untuk pertanian, dikatakannya harus sepenuhnya terserap.

"Upaya yang bisa dilakukan membantu para petani dalam sarana prasarana pertaniannya. Begitu juga dengan lahan-lahan eks pertambangan, saya minta jadi perhatian serius," tandasnya. (adv/dez)

KORAN **DIGITAL**

radar.
MEDIA

RADAR BALIKPAPAN

EDISI SABTU
11 NOV 2023

AKTUAL & TERPERCAYA

.COM



BELI PERTALITE BERULANG KALI DI SPBU, 2 PRIA DI SAMBOJA DITANGKAP POLISI



**PENGENDARA DAN MASYARAKAT
MENGEHENINGKAN CIPTA DI TL
PLAZA BALIKPAPAN**



Antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kalimantan Timur

PERTAMINA SEBUT DISPARITAS HARGA PERTAMAX DAN PERTALITE PEMICU ANTREAN DI SPBU

BALIKPAPAN - Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan menjamin dan memastikan stok BBM subsidi dalam keadaan aman dan tersedia di Kalimantan. Monitoring juga terus dilakukan Pertamina Patra Niaga terhadap penyaluran Jenis BBM khusus penugasan (Pertalite) dan jenis BBM tertentu (Biosolar) dari terminal BBM hingga ke lembaga penyalur resmi Pertamina yakni Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Area Manger Communication, Relations and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Arya Yusa Dwicandra mengatakan, kondisi antrean di sejumlah SPBU beberapa waktu terakhir, pihaknya telah memastikan bahwa sebenarnya distribusi BBM dari terminal atau depot hingga ke SPBU tidak ada masalah.

"Stok di Depot terbukti aman bahkan rentang waktu ketahanan stok hingga lebih dari 9 hari akumulatif," ujarnya, Jumat (10/11/2023).

Lebih lanjut Arya menjelaskan, Patra Niaga Regional Kalimantan melihat fenomena antrean dise-

babkan karena adanya beberapa faktor, khususnya terkait disparitas harga sehingga mengakibatkan peningkatan jumlah pembeli BBM khususnya jenis Pertalite.

"Jauhnya perbedaan harga Pertamina dengan Pertalite yaitu sekitar Rp 4.000 membuat banyak konsumen Pertamina shifting (beralih) ke Pertalite. Hal ini menyebabkan jumlah konsumsi BBM jenis Pertalite bertambah khususnya di wilayah Kalimantan," jelasnya.

Arya menegaskan, tidak ada pengurangan dalam menyalurkan BBM Pertalite dan BBM Solar. Besaran penyaluran year to date hingga 31 Oktober 2023 di Kalimantan untuk Pertalite mencapai 78 persen dan Biosolar mencapai 81 persen dari kuota yang sudah ditetapkan.

"Artinya kalau dilihat dari sisa kuota masih aman hingga akhir tahun, namun nantinya kami akan menjelaskan lebih lanjut saat pelaksanaan satgas Natal dan Tahun Baru 2024," tambah Arya.

Untuk seluruh stok di terminal BBM Pertamina stok cukup aman, bahkan memiliki ketah-

anan hari akumulatif selama 9-12 hari baik jenis Gasoline maupun Gasoil. Tidak ada kelangkaan dan stok masih aman di terminal BBM.

Untuk itu, ia mengimbau agar masyarakat membeli BBM sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya. Untuk masyarakat yang mampu secara ekonomi yang masih menggunakan BBM subsidi diharapkan dapat beralih untuk menggunakan BBM non-subsidi.

"Kami berharap masyarakat bisa membeli BBM secara bijak terkhusus BBM subsidi, belilah BBM sesuai kebutuhan dan spesifikasi kendaraan," tegasnya.

Untuk masyarakat yang lebih mampu, Pertamina menyediakan berbagai jenis BBM berkualitas sesuai spesifikasi kendaraan seperti Pertamina, Pertamina Turbo serta Pertamina Dex dan Dexlite. Agar BBM subsidi dapat diterima oleh masyarakat yang berhak dan tidak dimanfaatkan oleh para penimbun BBM serta oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Penulis : Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari



Mengheningkan cipta yang dilaksanakan di traffic light Plaza Balikpapan, pada Jumat (10/11) pagi sekitar pukul 10.15 Wita.

PENGENDARA DAN MASYARAKAT MENGEHENINGKAN CIPTA DI TL PLAZA BALIKPAPAN

BALIKPAPAN - Sejumlah pengendara dan masyarakat yang melintas di traffic light Plaza Balikpapan, atau tepatnya di Jalan Jendral Sudirman pada Jumat (10/11/2023) sekitar pukul 10.15 Wita menghentikan seluruh aktivitasnya dan melaksanakan mengheningkan cipta.

Sebelum dimulainya mengheningkan cipta, petugas dari Satlantas Polresta Balikpapan, Dishub Balikpapan, Satpol PP Balikpapan dan relawan kemanusiaan melakukan pengaturan arus lalu lintas.

Kanit Patwal Satlantas Polresta Balikpapan, AKP Nur Alim mengatakan, penghentian kendaraan untuk memperingati hari pahlawan ini dilakukan selama 60 detik. Dan seluruh pengendara dan masyarakat mengambil sikap sempurna.

"Seperti diketahui pada hari ini 10 November 2023 merupakan Hari Pahlawan, untuk itu kita melaksanakan mengheningkan cipta di TL Plaza ini selama 60 detik," ujarnya.

Lebih lanjut Nur Alim menjelaskan, pelak-

sanaan mengheningkan cipta di jalan ini berdasarkan instruksi Pemerintah Kota Balikpapan. Di mana seluruh traffic light akan dibunyikan sirine selama 60 detik dan dilakukan mengheningkan cipta.

"Ini dilakukan untuk menghormati arwah leluhur dan para pejuang yang telah mendahului kita. Ini adalah bentuk penghormatan kita di Hari Pahlawan ini," jelasnya.

Pada kesempatan ini terlihat pula 3 orang warga yang mengenakan pakaian mirip pahlawan. Bahkan mereka datang menggunakan sepeda ontel dan berdiri di pinggir jalan.

"Ini cara kami memaknai Hari Pahlawan, tidak hanya amanatnya yang kita teladanin tapi sikap dan perjuangannya juga kita laksanakan di masa saat ini," ujar Chairil Anwar.

Usai melaksanakan mengheningkan cipta selama 60 detik, arus lalu lintas di traffic light Plaza Balikpapan kembali normal.

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari



Anggota Komisi I DPRD Balikpapan, Edi Alfonso.

EDI ALFONSO SARANKAN CALEG TAK PASANG APK SEBELUM JADWAL MASA KAMPANYE

BALIKPAPAN - Anggota Komisi I DPRD Balikpapan, Edi Alfonso menyarankan kepada para calon legislatif (Caleg) untuk menahan diri agar tidak memasang Alat Peraga Kampanye (APK) terlebih dulu sebelum masa kampanye 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

Ini disampaikannya untuk menjaga kondusivitas, sportivitas dan estetika Kota Balikpapan. Pasalnya, APK yang sudah ada saat ini berani menunjukkan ajakan untuk memilih caleg tersebut.

"Mereka nanti pasang baliho, tak tahu dibongkar. Kasihan, sayangkan karena itu juga mengeluarkan biaya," ujarnya, Jumat (10/11/2023).

Lebih lanjut Edi Alfonso menjelaskan, apa yang disampaikannya ini bukanlah imbauan, tapi untuk menyampaikan bagi yang tidak mengetahui aturan sehingga disay-

angkan jika APK harus dicopot oleh petugas. Dengan kondisi seperti ini, disarankannya juga kepada Bawaslu untuk melakukan sosialisasi kembali soal aturan APK kepada masing-masing parpol.

"Satpol PP akan berkoordinasi dengan Bawaslu, Bawaslu akan memberikan informasi bahwa ada yang menyalahi aturan. Baru Satpol PP mengesekusi, apalagi pasang tanpa sepengetahuan di lahan orang. Kecuali di rumah sendiri," jelasnya.

Bahkan, kalau APK dipasang di rumah sendiri lebih aman. Meski aturan itu masih belum diketahuinya apakah boleh dilakukan atau tidak. "Saya rasa nggak apa-apa, karena rumah sendiri," tutupnya. (ADV/DPRDBalikpapan/Bom)

Pewarta : Aprianto

Editor : Nicha Ratnasari



Foto: Wakil Ketua Komisi I DPRD Balikpapan, Simon Sulean.

KOMISI I GELAR RAPAT KERJA, PRIORITASKAN NASKAH AKADEMIK MENJADI RAPERDA

BALIKPAPAN - Komisi I DPRD Balikpapan bersama mitra kerjanya melakukan rapat kerja dalam rangka inventarisasi kebutuhan kajian akademik dan naskah akademik serta persiapan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2024.

Mitra kerja tersebut, yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Satpol PP, Bidang Pertanahan DPPR, Bagian Kerjasama Perkotaan dan Bagian Pemerintahan, serta Bagian Hukum dan Bagian Organisasi.

Rapat Kerja tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi I, Simon Sulean. Simon Sulean mengatakan, bahwa sudah ada beberapa Kajian Akademik yang sudah dikaji kemudian diusulkan atau ditingkatkan menjadi Naskah Akademik.

"Mana yang lebih prioritas, maka itu yang akan ditingkatkan menjadi Naskah Akademik atau Naskah Penjelasan," ujarnya, Jumat (10/11/2023).

Simon menjelaskan, ada beberapa kajian

yang bersifat penting di antaranya, tentang Wawasan Kebangsaan Cinta Tanah Air dan Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Untuk Naskah Akademik atau Penjelasan yang tengah dimatangkan menjadi Peraturan Daerah di antaranya, Perda Reklame dan Revisi Perda Ketertiban Umum (Tibum).

"Kalau Perda Reklame itu urgent karena menyangkut Pendapat Asli Daerah (PAD). Sedangkan Perda Tibum sedang direvisi, bahkan mungkin akan dirubah karena ada yang belum terakomodir, jadi akan ada tambahan cantolan di dalam Perda tersebut," jelasnya.

Simon menambahkan, secara menyeluruh terdapat 6 kajian prioritas yang ingin ditingkatkan menjadi Naskah Akademik. Serta ada 3 Naskah Akademik yang dilanjutkan pembahasannya untuk menjadi Peraturan Daerah (Perda).

"Jadi tidak banyak yang dikaji, karena kajian itu sudah ada semua, tinggal mana yang dilanjutkan ditingkatkan menjadi Naskah Akademik dan yang mana yang dicoret," tutupnya. (ADV/DPRDBalikpapan/Bom)

Pewarta : Aprianto

Editor : Nicha Ratnasari



Wakil Ketua II DPRD Balikpapan, Sabaruddin Panrecalle.

PELAYANAN RS MEDIKA UTAMA MANGGAR DINILAI BURUK, SABARUDDIN MINTA KOMISI IV DPRD LAKUKAN SIDAK

BALIKPAPAN - Kabar pasien remaja putri berinisial DA (15) meninggal dunia yang diduga akibat tidak optimalnya pelayanan Rumah Sakit (RS) Medika Utama Manggar, mendapat sorotan dari Wakil Ketua II DPRD Balikpapan, Sabaruddin Panrecalle.

Sabaruddin meminta Komisi IV DPRD Balikpapan untuk melakukan kunjungan lapangan ke Rumah Sakit (RS) Medika Utama Manggar.

"Setiap datangnya ajal memang tidak bisa dihindari, karena itu takdir dari yang maha kuasa. Namun yang mesti dipertanyakan itu terkait pelayanan di Rumah Sakit tersebut," ujarnya, Jumat (10/11/2023).

Sabaruddin mengaku enggan berspekulasi atas adanya dugaan malpraktek atau sejenisnya yang membuat korban tersebut meninggal dunia di rumah sakit tersebut. Tapi yang ditekankannya adalah masalah pelayanannya.

Ia mengatakan informasi dari Komisi IV DPRD Balikpapan saat kunjungan ke sana terhadap kasus meninggalnya ibu hamil, juga didapatkan informasi yang sama saat dirinya menggelar kegiatan serap aspirasi (Reses) di Daerah Pemilihan (Dapil) Balikpapan Timur.

"Saat kami reses persoalan itu juga mencuat keluhan, karena itu kami sampaikan kepada

Komisi IV untuk segera melaksanakan kunjungan lapangan di Medika Utama Manggar," jelasnya.

Menurutnya, apabila nanti ditemukan hal-hal yang tidak berpihak kepada masyarakat atau Prosedur Tetap (Protap)-nya, maka ditegur. Kalau tidak layak maka harus dilakukan tindakan bersama-sama.

"RS Medika ini sudah standar atau nggak. Kalau sudah pelayanannya tidak standar dari Dinas Kesehatan (Dinkes) ataupun dari mitra bersangkutan jangan merekomendasikan. Tapi rekomendasikan pasien ke Puskesmas di sekitaran wilayah sana," tambahnya.

Begitu juga, dikatakannya kepada Dinkes Balikpapan untuk mencabut izin RS Medika Utama Manggar tersebut. Jika terbukti melanggar yang tak sesuai aturan.

"Kita ini kan yang pertama memberikan pelayanan yang utama, orang yang datang kesana itu bukan orang sehat. Tapi orang yang sakit dan perlu dilakukan pertolongan yang pertama, dilayani dulu. Jangan administrasinya dulu suruh diurus," tutupnya. (ADV/DPRDBalikpapan/Bom)

Pewarta : Aprianto

Editor : Nicha Ratnasari

KORAN **DIGITAL**

radar.
MEDIA
TERDEPAN

RADAR PASER

AKTUAL & TERPERCAYA

.COM

EDISI SABTU
11 NOV 2023



DPRD SEPAKAT PENATAAN RTH DAN FASUM HARUS PENUHI UNSUR YANG LENGKAP

**DPRD PASER PASTIKAN
PERBAIKAN WISKUL RAMPUNG
AKHIR NOVEMBER**





Peninjauan fasum di Jakarta



Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Paser, Edwin Santoso

DPRD SEPAKAT PENATAAN RTH DAN FASUM HARUS PENUHI UNSUR YANG LENGKAP

PASER - Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan fasilitas umum (Fasum) di Kabupaten Paser terus diupayakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser. Upaya penataan itu salah satunya dilakukan dengan menengok pembangunan trotoar di DKI Jakarta.

Hal itu dilakukan Bupati Paser, Fahmi Fadli, bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Kabupaten (Setkab) Paser, Adi Maulana dan Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Paser, Muhamad Syaukani.

Agenda itu dilangsungkan beberapa waktu lalu di tengah-tengah kunjungan kerja (kunker), tepatnya di Jalan Jendral Sudirman, Jakarta Pusat. Bupati Paser, Fahmi Fadli, bahkan menginginkan agar fasum yang ada bisa ditiru di Kabupaten Paser.

"Waktu itu kami sempatkan melihat langsung, sebagai studi internal untuk meninjau fasilitas umum daerah lain supaya bisa diterapkan di Kabupaten Paser," kata Fahmi.

Menurutnya, pembangunan fasum ke depan tak hanya memberikan keindahan, tapi juga memiliki banyak manfaat untuk masyarakat, baik dari segi budaya, pendidikan, maupun kesehatan.

"Jadi fasilitas umum untuk masyarakat tak hanya rapi dan indah namun juga terdapat unsur pendi-

dikan, kesehatan serta budaya kearifan lokal di Paser dan tentunya tak kalah indah dengan kota-kota besar lain di Indonesia," katanya.

Sementara itu, Kabid Cipta Karya DPUTR Kabupaten Paser, Muhamad Syaukani menambahkan, trotoar diwacanakan memiliki kelengkapan unsur, dari segi pedestrian, disabel, taman, tempat duduk, tempat sampah, teduh, penerangan, halte bus, dan fasilitas umum lainnya.

Selain itu ditambah unsur kebudayaan dan pendidikan. "Rencananya, trotoar seperti ini akan diterapkan di jalur utama Tanah Grogot, yakni Jalan Jendral Sudirman dan Jalan Noto Sunardi," sebutnya.

Menanggapi sejumlah rencana itu, Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser, Edwin Santoso menilai, pembangunan RTH dan fasum di Kabupaten Paser harus segera ditindak lanjuti.

Baginya, penataan yang akan direncanakan harus memiliki unsur yang lengkap. "Jadi ke depan jika itu jadi, harus benar benar punya manfaat. Seperti siring kandilo itu sudah bagus, tinggal fasum lainnya lagi seperti apa. Kita percayakan ini ke Pemerintah," ungkap Edwin.

Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari



Wiskul Sungai Tuak

DPRD PASER PASTIKAN PERBAIKAN WISKUL RAMPUNG AKHIR NOVEMBER

PASER - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser langsung turun gunung meninjau lokasi kawasan Wisata Kuliner (Wiskul) Desa Sungai Tuak, Kecamatan Tanah Grogot pasca Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait masalah ini.

Turun gunung ini dilakukan oleh beberapa perwakilan Fraksi di DPRD Kabupaten Paser guna memastikan kondisi terkini fasilitas umum milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser itu khususnya booth kontainer yang kerap dipersoalkan.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Paser, Basri Mansur menyebut, dari hasil peninjauan yang sudah dilakukan yakni mendengar langsung dan sudah ada kesepakatan dari pihak pelaksana kegiatan di tahun 2022 untuk dilakukan perbaikan.

"Mereka siap memperbaiki segala sesuatunya, kemudian menyelesaikan kebocoran-kebocoran kontainer atau kios yang selama ini menjadi keluhan pedagang," terang Basri, Kamis (9/11/2023).

Selain itu, dijelaskan Basri, dari pihak pengelola akan melaksanakan hingga memaksimalkan apa yang menjadi perjanjian kontrak dengan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Paser.

"Baik itu pelayanan jasanya, kemudian penyelenggaraan

event yang ditargetkan sebulan dua kali sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Itu memang harus diselesaikan, dan merupakan tanggung jawab dari pihak pengelola," tambahnya.

Hal itu dilakukan, mengingat kondisi Wiskul sedikit peminat. Tak ingin perosalan di Wiskul Sungai Tuak kian berlarut, DPRD Kabupaten Paser juga memberikan tenggang waktu bagi pihak pelaksana kegiatan tahun 2022 atau kontraktor untuk bisa diselesaikan.

"Kami target pihak pelaksana memperbaiki kontainer pedagang yang mengalami kerusakan, dengan limit waktu akhir bulan ini (November) sudah harus selesai semua," tegas Basri.

Diungkapkan, hal itu sudah dituangkan dalam Berita Acara (BA) RDP kala itu. Secara tegas, Basri menyebut, DPRD Kabupaten Paser maupun Pemkab Paser akan serius mengawal peningkatan maupun peningkatan Wiskul Sungai Tuak dengan sebaik-baiknya.

"Kontainer pedagang nantinya akan direlokasi atau ditata kembali tahun depan, mungkin dibentuk leter U atau O yang ditengahnya ada kursi maupun meja dan sebagainya serta untuk pengamanan hujan akan ada atapnya," ulasnya.

Selain itu, tema dari Wiskul Sungai Tuak juga akan diubah kemudian dikonsepsi kembali oleh Dis-

porapar Paser dan perencanaan di tahun 2024 tersebut terlebih dahulu akan dilakukan komunikasi dengan pedagang. Agar ke depan wisata kuliner bisa lebih baik lagi dan pelaku UMKM bisa merasakan manfaatnya dengan menjamin keamanan dan kenyamanan dari mereka.

"Dengan begitu, tentu akan meningkatkan ekonomi para pelaku UMKM dan imbasnya pada PAD di tahun 2024," jelas Basri.

Disporapar Kabupaten Paser juga telah mengusulkan anggaran Rp 2,5 miliar untuk rencana itu, dengan memaksimalkan Wiskul Sungai Tuak.

"Informasinya seperti itu. Hanya saja kami minta untuk meningkatkan lagi anggarannya supaya bisa lebih maksimal lagi," imbuhnya.

Selain perbaikan booth kontainer, sarana dan prasarana penunjang lainnya akan dilengkapi seperti dengan pemasangan paving blok di area Wiskul Sungai Tuak yang kerap digenangi air ketika terjadi hujan.

"Itu masuk dalam volume pengerjaan tahun ini, dan November ini juga harus selesai. Perbaikan yang dilakukan tidak merubah perencanaan awal, akan dikembalikan seperti semula seperti yang plywoodnya rusak kemudian plat yang bertagar di perbaiki semua," tutup Basri.

Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari